

**EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
BAGI KORBAN TERDAMPAK BENCANA
DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Heryanto Dwitama

NPP. 30.1243

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: heryantodwitama@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anwar Rosshad, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problems of permanent housing development after the 2018 disaster in Palu City which until now has not been completely resolved.

Purpose: The purpose of this research itself is to describe and analyze the implementation of the permanent housing development program, the inhibiting factors and efforts to overcome these inhibiting factors. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the theory of evaluation according to William N Dunn's theory. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. **Result:**

The results of the study show that the five indicators are almost running well but there are still a number of things that are used as evaluation material so that they must be improved in the future.

Conclusion: The implementation of the permanent housing development program has been going quite well, however, there are still obstacles that can hinder the development of permanent housing, so efforts are needed to solve these inhibiting factors. It is hoped that the evaluation concept of the permanent housing development program will make it more effective and easier for the government's program regarding the construction of permanent housing in the future.

Keywords: Evaluation; Development; Permanent Residents; Empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pembangunan hunian tetap pasca bencana tahun 2018 di Kota Palu yang sampai saat ini masih juga belum terselesaikan secara tuntas.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pembangunan hunian tetap, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta analisis terhadap teori evaluasi menurut Teori William N Dunn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima indikator hampir berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi sehingga harus ditingkatkan lagi kedepannya.

Kesimpulan: Pelaksanaan program pembangunan hunian tetap ini sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih memiliki hambatan yang dapat menghambat jalannya pembangunan hunian tetap sehingga dibutuhkan upaya untuk memecahkan faktor penghambat tersebut. Diharapkan dengan adanya konsep evaluasi dari program pembangunan hunian tetap ini dapat lebih

mengefektifkan dan mempermudah program pemerintah mengenai pembangunan hunian tetap kedepannya.

Kata kunci: Evaluasi; Pembangunan; Hunian Tetap; Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Tahun 2018 di Kota Palu dan sekitarnya terjadi suatu bencana besar yang dipicu oleh gempa bumi berskala 7,4 SR sehingga memunculkan bencana lainnya yaitu bencana tsunami dan likuifaksi yang menimpa beberapa daerah di Kota Palu. Bencana ini selain menimpa Kota Palu juga dirasakan dan berdampak parah di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi yang merupakan tetangga Ibu Kota Sulawesi Tengah ini.

Pada Wilayah Kota Palu sendiri terjadi 2 (dua) bencana alam susulan setelah terjadinya gempa bumi bermagnitudo 7,4 SR, yaitu bencana tsunami dan likuifaksi secara bersamaan. Bencana tsunami terjadi di daerah pesisir yaitu meliputi daerah yang dekat dengan pantai seperti Kelurahan Tondo dan Kelurahan Lere, sedangkan bencana likuifaksi terjadi di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa.

Bencana likuifaksi yang terjadi di Kota Palu ini juga merupakan suatu hal yang tak disangka-sangka. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peringatan pascagempa bumi terjadi dan minimnya wawasan masyarakat mengenai likuifaksi sehingga menyebabkan masyarakat memilih untuk berlindung di rumah setelah terjadinya gempa bumi. Sehingga ketidaktahuan masyarakat tersebut yang menjadi malapetaka sehingga warga yang berada di lokasi tersebut terseret arus lumpur bahkan sampai tenggelam di dalam lumpur.

Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa merupakan wilayah terdampak besar bencana likuifaksi di Kota Palu bahkan bangunan di kelurahan tersebut sebagian besar hampir rata dengan tanah. Kedua kelurahan ini merupakan daerah padat penduduk atau juga merupakan daerah pemukiman warga. Akibatnya terdapat begitu banyak korban jiwa di kedua kelurahan ini maupun kerugian materiil dimana hilangnya tempat tinggal bagi ratusan ribu penduduk dan hilangnya lingkungan bagi masyarakat untuk bermukim.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan beberapa mitra terkait termasuk OSM (Open Street Map) yang tertuang di dalam lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana didapati informasi bahwa peristiwa bencana likuifaksi yang terjadi di Kelurahan Balaroa mencakup daerah seluas 51,34 ha yang terdiri atas 1.364 bangunan rusak dan 263 bangunan diperkirakan rusak. Adapun daerah terdampak likuifaksi di Kelurahan Petobo mencakup daerah seluas 175,64 Ha yang terdiri atas 2.059 bangunan rusak dan 224 bangunan diperkirakan rusak. Berdasarkan informasi tersebut didapati total bangunan yang rusak dan diperkirakan rusak di wilayah Petobo dan Balaroa ialah sebanyak 3.910 bangunan di wilayah seluas 226,98 Ha.

Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa merupakan daerah pemukiman padat penduduk di Kota Palu yang menjadi titik bencana likuifaksi. Likuifaksi yang menggulung Petobo dan Balaroa dipicu oleh gempa bumi berskala 7,4 SR tersebut mengakibatkan ribuan rumah terendam dan tenggelam oleh lumpur. Bencana likuifaksi yang terjadi memakan begitu banyak korban jiwa sehingga berdampak begitu dalam bagi masyarakat sekitar, padahal bencana likuifaksi ini sudah pernah diprediksi sebelumnya. Seorang peneliti mengatakan, “Kota Palu memiliki peluang besar terjadi likuifaksi di beberapa titik yang berpotensi tinggi mengalami penurunan tanah dan perpindahan lateral” (Widyaningrum, 2012). Hasil penelitian ini sudah diberikan kepada pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti.

Pembangunan Hunian Tetap merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di

sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada Tahun 2018. Menurut informasi yang diperoleh dari situs PANRB, per tanggal 23 Mei 2022, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sudah mengeliminasi 45 persen dari total rencana pembangunan hunian tetap di Kota Palu, atau 3.463 unit hunian tetap dari total rencana 7.682 unit hunian tetap (Humas Kementerian PUPR, 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pembangunan hunian tetap di Kota Palu. Penyediaan dan pembebasan lahan pembangunan yang masih terkendala menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Banyak warga yang secara mendadak mengklaim bahwa lahan yang ingin dibangun hunian tetap tersebut merupakan lahan pribadi milik mereka, juga karena masih banyaknya HGU yang masih berlaku di daerah tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Kota Palu. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Amanda sebagai Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah yang juga mengatakan bahwa permasalahan utama pembangunan hunian tetap ini ialah pembebasan lahan. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan hunian tetap ini tidak dapat dimulai apabila permasalahan lahan ini belum diselesaikan secara tuntas karena apabila dipaksakan maka hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Permasalahan lainnya juga ialah terkait dengan penetapan warga yang memiliki hak untuk mendapatkan hunian tetap ini masih simpang siur. Pemberian hunian tetap ialah bagi warga masyarakat yang kehilangan rumah ataupun dikategorikan terdampak berat dalam korban bencana. Namun, jumlah korban bencana yang berhak atas hunian tetap dari pemerintah ini masih belum sepenuhnya valid dan terverifikasi. Sehingga hal ini juga yang menjadi hambatan masalah dalam pembangunan hunian tetap di Kota Palu.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga ialah lokasi permukiman sementara bagi warga yang tidak memiliki hunian atau tempat tinggal sama sekali. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menyediakan hunian sementara sembari menunggu penyelesaian pembangunan hunian tetap agar tidak ada warga yang terlantar selama proses pembangunan hunian tetap ini. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap inilah merupakan wujud pemberdayaan dari pemerintah kepada masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya dijadikan penulis sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian sebelumnya ialah berupa paparan singkat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang kemudian akan dijadikan bahan perbandingan dengan judul penelitian penulis. Penelitian Murat Tas, Nilufer Tas, dan Nilay Cosgun berjudul *Study on permanent housing production after 1999 earthquake in Kocaeli (Turkey)* (Tas, Tas & Cosgun, 2010), menemukan bahwa dalam pembangunan hunian tetap harus memperhatikan kondisi tanah, waktu pembangunan, persiapan dan pembuatan rencana pembangunan, kawasan pembangunan cadangan, kualitas tenaga kerja, desain unit, dan faktor lainnya sehingga pembangunan hunian dapat terlaksana secara maksimal. Penelitian Fryda Nurmadewi yang berjudul *Evaluasi kualitas dan kerentanan bangunan hunian terhadap gempa bumi menggunakan aplikasi ACeBS : studi kasus hunian tetap di Kecamatan Cangkringan dan Dusun Ngancar* (Nurmadewi, 2022), menemukan bahwa pembangunan hunian tetap oleh pemerintah lebih baik dibandingkan dengan pihak diluar pemerintah karena sesuai dengan standar pembangunan, ditemukan juga bahwa hasil kualitas bangunan ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek struktural, aspek arsitektural, aspek mekanikal, aspek elektrik, aspek tata lingkungan, aspek biaya pembangunan, dan aspek waktu pelaksanaan yang dinilai cukup baik.

Penelitian Retnadumillah Saliha dan Darwati Pakki yang berjudul Kewajiban pemerintah menyediakan hunian tetap (hunatap) bagi korban gempa dan tsunami di Kab. Donggala (Saliha & Pakki, 2021) menemukan bahwa Pemerintah Kab. Donggala wajib untuk membuat suatu perencanaan dalam memenuhi hak masyarakat yang terdampak langsung gempa, dan tsunami yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam aturan Intruksi Presiden No.10 Tahun 2018 dan Surat Keputusan No. 360/034/BPBD-G.ST/2019, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum cukup memuaskan. Penelitian Rasyid Ridha, Lukmanul Hakim dan Dedy Dharmawansyah yang berjudul Evaluasi kebijakan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB (Ridha dkk, 2021) menemukan bahwa pembangunan hunian tetap harus memperhatikan segi indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, anggaran dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian Aulia Istiqomah dan Sriadi Setyawati tentang Kualitas lingkungan permukiman hunian tetap masyarakat korban erupsi gunung merapi Tahun 2010 (Istiqomah & Setyawati, 2010) ditemukan bahwa aspek-aspek permukiman di tempat penelitian sudah cukup lengkap, namun masih ada masalah lainnya yang butuh perhatian lebih dari pemerintah setempat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana peneliti dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi dalam pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana likuifaksi di Kota Palu. Penelitian ini memiliki konsep yang berbeda dengan kelima penelitian tersebut. Selain itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dimana pada kelima penelitian sebelumnya memang sama-sama membahas mengenai hunian tetap, pembangunan hunian tetap, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan sampai ke faktor lingkungan yang memengaruhi hunian tetap tersebut, bahkan ada yang membahas mengenai evaluasi juga namun berbeda fokus dengan penelitian ini. Pada penelitian ini juga membahas mengenai hunian tetap yang berorientasi pada evaluasi pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana likuifaksi di Kota Palu yang memiliki fokus utama pada faktor penyebab mengapa pembangunan hunian jadi terhambat. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn (Dunn, 2000) yang menyatakan bahwa terdapat suatu tolak ukur yang dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi jalannya program tersebut, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Kota Palu serta dapat mendeskripsikan faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan hunian tetap di Kota Palu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya". (Sugiyono, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara penulis secara mendalam melakukan diskusi terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen BP2P Sulawesi II, Pejabat Pembuat Komitmen BPPW Wilayah Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sulawesi Tengah, Lurah Petobo, Lurah Balaroa, dan masyarakat (dalam hal ini warga penerima manfaat pembangunan hunian tetap sebanyak 9 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh William N. Dunn (Dunn, 2000) yang memiliki dimensi yaitu, efektivitas, ketepatan, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis proses pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Kota Palu dengan menggunakan pendapat dari William N. Dunn yang menyatakan bahwa dalam evaluasi memiliki lima dimensi yaitu, efektivitas, ketepatan, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas.

3.1. Efektifitas Program Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Terdampak Bencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan terkait efektifitas pelaksanaan program pembangunan hunian tetap, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan hunian tetap ini sudah berjalan dengan cukup efektif dan sesuai waktu walaupun masih terdapat kendala. Koordinasi antara pemerintah dengan instansi terkait termasuk masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan program ini sehingga dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.

3.2. Efisiensi Program Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Terdampak Bencana

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dalam program pelaksanaan pembangunan hunian tetap ini sudah berjalan dengan cukup efisien. Permasalahan mengenai syarat-syarat dari pihak peminjam yang sudah diselesaikan ini kemudian yang menjadi masalah. Namun, dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang jelas serta kejelasan tugas masing-masing akan membuat tugas pembangunan ini menjadi lebih efisien.

3.3. Tingkat Kecukupan Capaian Program Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Terdampak Bencana

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait kecukupan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan hunian tetap di Kota Palu telah dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kecukupan program pembangunan. Dilihat dari pemerintah yang memastikan kepuasan terhadap warga yang bertempat tinggal di hunian tetap, membangun sarana prasarana penunjang di hunian tetap, memperhatikan keterjangkauan lokasi hunian tetap dengan tempat aktivitas lainnya, dan lain-lain. Hal ini menjadi contoh nyata penerapan tingkat kecukupan program pembangunan hunian tetap tersebut.

3.4. Ketepatan Sasaran Program Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Terdampak Bencana

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan hunian tetap ini sudah cukup sesuai dengan sasaran. Namun memang masih memiliki hambatan dalam penyelesaiannya yaitu masih ada dua hunian tetap kawasan yang sedang dalam proses pembangunan karena terhambat masalah sengketa tanah. Sedangkan hunian lainnya sudah dapat dihuni oleh warga terdampak bencana di Kota Palu. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pembangunan hunian tetap ini sudah sesuai dengan sasaran target pembangunan hunian tetap.

3.5. Responsivitas Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Terdampak Bencana

Untuk menganalisis indikator responsivitas ini terdapat beberapa kriteria yang berkenaan dengan seberapa jauh program tersebut mampu memuaskan kebutuhan dari warga masyarakat yang terdampak bencana. Adapun hal tersebut ditinjau dari :

a. Persepsi Masyarakat Terkait Kesesuaian Harapan Atas Terlaksananya Program

Menurut penulis, respon dari masyarakat mengenai kesesuaian harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan hunian tetap ini sudah baik karena telah berhasil memberdayakan masyarakat yang pada konteks ini warga terdampak bencana di Kota Palu.

b. Persepsi Masyarakat Terkait Manfaat Yang Dirasakan

Menurut hasil wawancara dan berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan hunian ini sangat bermanfaat dan bernilai guna bagi warga disini. Pengamatan penulis juga, dilokasi hunian tetap ini terdapat lahan kosong yang memiliki pemandangan yang sangat indah sehingga terdapat warga yang membuka cafe dan rumah makan yang sangat ramai di malam harinya. Sehingga dapat menjadi peluang usaha yang bagus bagi warga disekitar lokasi hunian tetap ini, sebagai pengganti pekerjaan mereka yang sebelumnya belum ada atau hilang akibat bencana.

c. Persepsi Masyarakat Terkait Permasalahan Yang Dihadapi

Menurut hasil wawancara dan berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan setelah adanya pembangunan hunian tetap ini. Permasalahan mengenai air dan listrik yang menjadi bagian dari kehidupan warga, juga permasalahan warga yang berhak dan tidak berhak atas kepemilikan hunian disini. Sehingga pemerintah dituntut untuk dapat meninjau kembali mengenai permasalahan yang muncul dari pembangunan hunian tetap ini dan diharapkan adanya solusi dan jalan keluar yang muncul untuk penyelesaian masalah.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program pembangunan hunian tetap ini memberikan banyak dampak positif bagi warga masyarakat yang terdampak bencana dalam rangka upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Pembangunan hunian tetap ini juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan dari pemerintah kepada warga masyarakatnya yang terdampak bencana di Kota Palu. Penulis menemukan temuan penting yakni masih terdapat permasalahan lain yang muncul setelah adanya pembangunan hunian tetap ini, permasalahan tersebut ialah permasalahan persediaan air bersih yang masih sulit, permasalahan pembiayaan listrik untuk penerangan lampu jalan yang masih dibebankan kepada warga penghuni hunian tetap padahal merupakan kewajiban dari pemerintah karena warga telah membayar pajak, dan permasalahan mengenai warga yang berhak dan tidak berhak atas kepemilikan fasilitas hunian tetap. Sama halnya dengan temuan Ridha dkk bahwa dari segi indikator ketepatan belum cukup baik, dari proses pelaksanaan masih terdapat penerima dana yang tidak lengkap secara administrasi kependudukan sesuai kriteria penerima dana. Ditambah masih terdapat penerima dana ganda. (Ridha dkk,2021), begitu pula dari pembangunan hunian tetap ini dimana seorang warga mengatakan bahwa masih terdapat warga yang sebenarnya tidak berhak atas hunian tetap namun faktanya mereka tetap

mendapat fasilitas hunian tetap. Padahal masih ada warga yang berhak namun masih belum mendapatkan fasilitas hunian tetap tersebut. Serupa dengan temuan Istiqomah dkk bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas lingkungan permukiman, salah satunya ialah penerangan di areal permukiman yang masih belum maksimal (Istiqomah,2016). Salah satu permasalahan yang muncul setelah pembangunan hunian tetap di Kota Palu juga terkait penerangan di areal permukiman yang masih memanfaatkan dana mandiri dari warga dan bukan dari pemerintah padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hal tersebut karena warga telah membayar pajak.

Layaknya program pembangunan hunian tetap lainnya, permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan hunian tetap itu adalah terkendala waktu dan tenaga kerja, layaknya temuan Tas dkk (Tas dkk, 2010). Pembangunan hunian tetap di Kota Palu juga seperti demikian, dimana peneliti menemukan penghambat dalam pembangunan hunian tetap itu juga disebabkan kendala waktu dimana cuaca dan penyediaan material sangat mempengaruhi waktu pembangunan, penghambat lainnya ialah kendala tenaga kerja yang mana pengelola mengupayakan menggunakan tenaga lokal agar menghindari kecemburuan sosial namun hal itu yang menghambat pembangunan hunian tetap di Kota Palu. Hal tersebut diperkuat dalam penelitian Nurmadewi bahwa Hasil kualitas bangunan ditinjau dari beberapa aspek yang salah satunya ialah aspek mekanikal dan aspek waktu pelaksanaan (Nurmadewi, 2022).

Dalam pembangunan hunian tetap juga harus memiliki persiapan dan perencanaan yang matang agar dapat memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana, layaknya temuan Saliha dkk (Saliha, 2021). Pembangunan hunian tetap di Kota Palu juga telah dipersiapkan dengan baik sesuai instruksi Presiden dengan mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat untuk segera melaksanakan pembangunan hunian tetap di Kota Palu. Diharapkan pihak tersebut bekerja sesuai bidangnya dan melakukan koordinasi satu sama lain sehingga proses pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana dapat segera terlaksana secara menyeluruh.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pembangunan hunian tetap di Kota Palu ini yakni permasalahan sengketa lahan, terbatasnya anggaran penanganan bencana, terkendala waktu, dan terkendala tenaga kerja.

IV. KESIMPULAN

Program pembangunan hunian tetap di Kota Palu sudah berjalan dengan cukup baik namun belum terlalu optimal. Dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa hunian tetap yang terwujud, seperti Huntap Duyu, Huntap Tondo I, Huntap Balaroa, Huntap Talise, dan lain-lain. Namun masih ada juga hunian tetap yang sedang dikerjakan, dan hal itu disebabkan oleh permasalahan yang menjadi penghambat dalam program pembangunan tersebut. Dari ke lima indikator yang dilihat dari segi efektifitas dimana waktu ketentuan pelaksanaan program pembangunan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih diperlukan lagi koordinasi antar instansi terkait agar pelaksanaan berjalan lebih maksimal. Dari segi efisiensi dimana peran dan koordinasi dari instansi terkait dalam pelaksanaan program pembangunan ini telah bekerja secara maksimal dalam upaya pembangunan ini. Dari segi kecukupan yang mana capaian program ini mampu memberikan solusi positif bagi warga yang rumahnya telah tiada akibat dari bencana ini. Dari segi ketepatan dimana sasaran wilayah yang dituju sudah terbangun hunian tetap, namun masih ada juga yang belum terbangun akibat dari permasalahan lahan. Dari segi responsivitas yang mana respon masyarakat sebagian besar bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan hunian tetap ini namun masih ada masalah lain yang muncul setelah pembangunan hunian tetap ini yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Faktor penghambat dalam program pembangunan hunian tetap di Kota Palu.

- a. Permasalahan Sengketa Tanah
- b. Terbatasnya Anggaran Penanganan Bencana
- c. Terkendala Waktu
- d. Terkendala Tenaga Kerja

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan hunian tetap di Kota Palu.

- a. Melakukan Kebijakan Konsolidasi Tanah
- b. Mengoptimalkan Anggaran
- c. Mengefektifkan Waktu
- d. Menyeleksi Tenaga Kerja Berkualitas

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga terhambat dalam penelusuran terkait anggaran karena harus memiliki ijin khusus dan tidak secara sembarangan untuk mengaksesnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pembangunan hunian tetap di Kota Palu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen BP2P Sulawesi II, Pejabat Pembuat Komitmen BPPW Wilayah Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Lurah Kelurahan Petobo, dan Lurah Kelurahan Balaroa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Widyaningrum, Risna. 2012. “*Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquefaksi Daerah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah*”, Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, (57):43.
- Humas Kementerian PUPR. 2022. “3.463 Unit Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Sulteng Telah Dihuni.” <https://www.menpan.go.id/>. Retrieved September 6, 2022 (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/3-463-unit-hunian-tetap-bagi-korban-bencana-sulteng-telah-dihuni>).
- Tas, Murat, Nilufer Tas dan Nilay Cosgun. 2010. “*Study on Permanent Housing Production after 1999 Earthquake in Kocaeli (Turkey)*”, Jurnal Intenasional Disaster Prevention and Management Vol. 19, (1):6–19. doi: 10.1108/09653561011022108.
- Nurmadewi, Fryda. 2022. “*Evaluasi Kualitas Dan Kerentanan Bangunan Hunian Terhadap Gempa Bumi Menggunakan Aplikasi ACEBS : Studi Kasus Hunian Tetap Di Kecamatan Cangkringan Dan Dusun Ngancar*”. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Universitas Islam Indonesia.
- Saliha, Retnadumillah dan Darwati Pakki. 2021. “*Kewajiban Pemerintah Menyediakan Hunian Tetap (HunTap) Bagi Korban Gempa Dan Tsunami Di Kab. Donggala*”, Jurnal Maleo Law Vol. 5, (2):86–103.
- Ridha, Rasyid, Lukmanul Hakim dan Dedy Dharmawansyah. 2021. “*Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Perbaikan Dan Pembangunan Rumah Korban Gempa Bumi Di NTB*”, Prosiding Seminar Nasional Planoearth Vol.3, 129–33.
- Istiqomah, Aulia dan Sriadi Setyawati. 2016. “*Kualitas Lingkungan Permukiman Hunian Tetap*

Masyarakat Korban Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010”, Jurnal Geomedia Vol. 14,(November):97–106.

Agustino, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara. *Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 142. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.7890>

Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

